



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



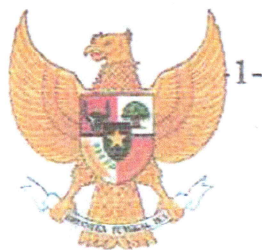
DISUSUN OLEH :

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA**

Alamat : Jln. Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) / Jln. G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota
Palangka Raya

Telp. (0536) 3242606 – Fax. (0536) 3242606

Email : kesbangpol.pky2019@gmail.com dan Website : kesbangpol.palangkaraya.go.id



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
6. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2025.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 16



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) – Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya
Telepon/Faksimile : (0536) 3242606, website/email : kesbangpol@palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Nomor 200.01/ ~~480~~ / BKBP/X/2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 154 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Palangkaraya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);

- 7.Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8.Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 (tambahan lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah;
- 11.Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009;
- 13.Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
- 14.Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RENJA Tahun 2025, adalah Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang dimulai sejak ditetapkan
- KEDUA : RENJA Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- KETIGA : RENJA Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025, selanjutnya disebut RKAP Tahun 2025.
- KEEMPAT : Uraian terperinci mengenai RENJA Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Penyusunan RENJA 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sehagimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada Tanggal : 07 Oktober 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya



BOY YEPHTHANIUS, S.E, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720803 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palangka Raya
2. Bapak Wakil Wali Kota Palangka Raya
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Nya kepada kami semua khususnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini untuk membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih didalam membangun program RPD, Visi dan Misi.

Akhir kata, kiranya Tuhan memberkati kita semua di segala tugas dan kerja.

Palangka Raya, 07 Oktober 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya



BOY YEPHANIUS, S.E, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19720803 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

BAB. I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 2

**BAB. II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK TAHUN 2024 3**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan..... 9

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 18

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Palangka Raya..... 18

3.2 Program dan Kegiatan 18

**BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH20**

BAB.IV. PENUTUP26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya. Didalamnya terdapat penjabaran visi misi, program dan kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kota Palangka Raya, selain daripada itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dilakukan dengan memperhatikan dokumen RKPD Kota Palangka Raya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dengan demikian RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan acuan dalam penyempurnaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam tahun yang sama, sehingga diharapkan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada tahun 2025 memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Kota Palangka Raya guna mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah.

7. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota palangka Raya Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2025, diarahkan untuk berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Palangka Raya dalam segala bidang guna menyiapkan kemandirian masyarakat Kota Palangka Raya, Hal ini berarti antara target dan pencapaian tidak mengalami hambatan berarti. Matriks rekapitulasi evaluasi renja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya dari tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik bagi Parpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Aparatur yang telah memahami pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung pengertian bahwa Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya sebagai lembaga teknis Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya di bidang kesatuan bangsa dan politik, memiliki tugas untuk menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society) di bidang pemahaman dan kemampuan komponen masyarakat dalam menjaga dan membangun ketahanan sosial, sumber daya alam dan ekonomi di Kota Palangka Raya, terutama dikalangan Ormas/LSM, Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di Kota Palangka Raya
3. Terselenggaranya pengembangan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Palangka Raya, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai budaya luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Palangka Raya dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan), dan Penanaman nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara demi NKRI.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan juga situasi pertahanan keamanan yang terus mengalami dinamika.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Palangka Raya dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, sebagai berikut :

- 1) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah, Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan, Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (*law enforcement*) dan peningkatan demonstrasi yang memprotes kebijakan Pemerintah.

- 2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus- modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palangka Raya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah tersusun 5 (lima) program yang terjabar dalam 11 kegiatan dengan 21 sub kegiatan, seperti dibawah ini yang terjabar dalam 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan, sebagai berikut :

Tabel T-C. 31 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Palangkaraya
Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PERIODE RENCANA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen	-	-	-	4.796.011.594.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	12 Dokumen	3.473.581.594.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			30 Orang/bulan	3.453.581.594.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30 Orang/bulan	3.453.581.594.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen			12 Dokumen	15.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12 Dokumen	20.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	294.500.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	100 %	475.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	10.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	15.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	60.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	60.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	10.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	10.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
												NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	14.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Paket	40.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	35.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4 Paket	35.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Dokumen	15.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan			20 Laporan	150.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20 Laporan	300.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	348.000.000.00			-	-	-	100 %	490.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	308.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	450.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	15.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	15.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			3 Unit	25.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Unit	25.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	535.000.000.00			-	-	-	100 %	535.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	100.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Laporan	100.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	435.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	5 Laporan	435.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	149.950.000.00			-	-	-	100 %	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit			9 Unit	100.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.209.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			10 Unit	25.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	10 Unit	25.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.209.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	24.950.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Unit	25.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.053.952.350.00						-	1.053.952.350.00	
	8.01.02.201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	8 angka			-	1.053.952.350.00			-	Meningkatn ya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	8 angka		1.053.952.350.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.201.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang			400 Orang	1.053.952.350.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Keterlibatan dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	-	400 Orang	1.053.952.350.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	3.254.300.000.00						-	4.000.000.000.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	-	18 Angka			-	3.254.300.000.00			-	-	-	18 Angka	4.000.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	18 Orang			10 Orang	3.254.300.000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	18 Orang	4.000.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	234.895.500.00						-	234.895.500.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	24 Angka			-	234.895.500.00			-	-	-	24 Angka	234.895.500.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		14	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang			55 Orang	234.895.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	20 Orang	234.895.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	153.586.000,00						-	153.586.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	16 Angka			-	153.586.000,00			-	-	-	16 Angka	153.586.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umot Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		6 Orang			6 Orang	153.586.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	6 Orang	153.586.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.501.604.500,00						-	1.650.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	4 Angka			-	1.501.604.500,00			-	-	-	4 Angka	1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4 Orang			4 Orang	201.604.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4 Orang	350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	1.300.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4 Dokumen	1.300.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	NON URUSAN						125.670.000.00							175.670.000.00	
	XXX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						125.670.000.00							175.670.000.00	
1.	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	125.670.000.00						-	175.670.000.00	
	XXX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 Dokumen			-	25.670.000.00			-	-	-	6 Dokumen	25.670.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	XXX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	25.670.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	6 Dokumen	25.670.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	XXX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	100.000.000.00			-	-	-	100 %	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	XXX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	100.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			J U M L A H					11.120.019.944.00							12.391.665.444.00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1) Tujuan :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

2) Sasaran :

- a. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat

3.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, Berdasarkan hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya 2008-2028 dengan Visi **“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”**

Untuk mendukung tercapainya visi dan terselenggaranya misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya menetapkan visi **“Garda Depan Memperkokoh Wawasan Kebangsaan, Pembauran Dan Kewaspadaan Daerah Berbasis Falsafah Hidup Budaya Huma Betang”**, dengan misi :

1. Meningkatkan pemahaman kearifan budaya lokal dengan mengedepankan hidup damai, kebersamaan, keberagaman, kesetaraan, toleransi, musyawarah dan mufakat
2. Menjadi acuan dalam mengembangkan nilai kepatuhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik
3. Menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang nyaman untuk berkarya dan berprestasi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya telah menyusun program dan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel T-C. 33, sebagai berikut :

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKARAYA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENJARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA ORG TAHUN 2023	PRAKIRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
B	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
1.	8.01	PROGRAM PENUNJANG KEMAMPUAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.661.182.876,00					12.725.995.444,00	
								10.661.182.876,00					12.725.995.444,00	
								5.298.022.876,00					5.633.561.594,00	
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	3.308.022.876,00			-	12 Dokumen	3.473.501.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			30	3.291.922.876,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	30 Orang/bulan	3.453.561.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen			12	16.100.000,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	12 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	540.000.000,00			-	100 %	540.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1	30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 Paket	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REINTRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	40.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Paket	40.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	35.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	4 Paket	35.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Dokumen	15.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan			20 Laporan	350.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	20 Laporan	350.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	530.000.000.00			-	-	100 %	670.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	360.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Unit	450.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	100.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Unit	150.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			3 Unit	70.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Unit	70.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	710.000.000.00			-	-	100 %	800.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	110.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Laporan	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	5 Laporan	700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD	100 %			100 %	210.000.000,00			-	-	100 %	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	9 Unit			9 Unit	160.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10 Unit			10 Unit	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	10 Unit	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Unit	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	1.160.000.000,00					-	1.063.952.350,00	
	8.01.02.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	8 angka			-	1.160.000.000,00			-	Meningkatn ya Keterliban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	8 angka	1.053.952.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi, Visi, Misi, dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang			400 Orang	1.160.000.000.00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ya Keterlibatan dan keamanan di kalangan masyarakat (MZSS)	-	400 Orang	1.053.952.350.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	2.853.160.000.00						-	4.000.000.000.00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	18 Angka			-	2.853.160.000.00			-	-	-	18 Angka	4.000.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebutuhan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Orang			10 Orang	2.853.160.000.00	Semua Kota/Kab, Kecamatan, Semua Keli/Desa Kota Palangkaraya, Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	18 Orang	4.000.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	150.000.000.00						-	234.895.500.00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	24 Angka			-	150.000.000.00			-	-	-	24 Angka	234.895.500.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	IASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Orang			55 Orang	150.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	20 Orang	234.895.500.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	330.000.000.00					-	153.586.000.00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	16 Angka			-	330.000.000.00			-	-	16 Angka	153.586.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		6 Orang			6 Orang	330.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	6 Orang	153.586.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	1.070.000.000.00					-	1.650.000.000.00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	4 Angka			-	1.070.000.000.00			-	-	4 Angka	1.650.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		4 Orang			4 Orang	370.000.000.00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	4 Orang	350.000.000.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen			4 Dokumen	700.000.000,00	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4 Dokumen	1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	NON URUSAN						270.000.000,00							175.670.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						270.000.000,00							175.670.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	270.000.000,00						-	175.670.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6 Dokumen			-	80.000.000,00			-	-	-	6 Dokumen	25.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	80.000.000,00	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	6 Dokumen	25.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhnya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKP/BMD	100 %			100 %	190.000.000,00			-	-	-	100 %	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	190.000.000,00	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			JUMLAH					10.931.182.876,00							12.901.665.444,00	

BAB V. PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen rencana tahunan. Penetapan program dan kegiatan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Untuk itu dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025, masing-masing Bidang dalam jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan Institusi yang menangani tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Palangka Raya berpedoman terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja ini, demi terciptanya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penyusunan rencana biaya pelaksanaan program dan kegiatan kiranya mempertimbangkan efisiensi secara rasional dan proporsional karena pagu anggaran yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu perlu disusun prioritas program dan kegiatan sesuai aspek-aspek yang dinilai strategis dan urgen.

Disamping hal tersebut disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi dan konsultasi dengan pendekatan secara formal maupun non formal dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan bagi masyarakat dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.